



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MATARAM MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

Volume 11, 2024



No. Katalog/Catalogue: 9302023.5271

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MATARAM MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

Volume 11, 2024

<https://mataramkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MATARAM MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 11, 2024

ISSN : -
Nomor Publikasi : 52710.24003
Katalog : 9302023.5271
Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv+74 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MATARAM
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023
Volume 11, 2024

Penanggungjawab Umum
Moh. Reza Nugraha K., S.ST, MAP

Penyunting
Ratih Sosilawati, SST.

Penulis
Ratih Sosilawati, SST.
Ouditiana Safitri S.Tr.Stat.

Penata Letak
Ratih Sosilawati, SST.

Pengolah Data
Ratih Sosilawati, SST.

Gambar Kulit
Ouditiana Safitri S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Analisis ekonomi dari sisi PDRB Menurut Pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah.

Apresiasi dan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kota Mataram sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data sangat kami harapkan, sehingga penyempurnaan publikasi dapat kami lakukan di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data.

Mataram, April 2024
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM



Moh. Reza Nugraha K., S.ST, MAP

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MATARAM
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 11, 2024

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
1.3 Kegunaan Statistik PDRB.....	7
Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT).....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5 Perubahan Inventori (PI)	27
2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	29
Bab III Tinjauan Perekonomian Kota Mataram Menurut PDRB Menurut Pengeluaran.....	31
3.1 Perkembangan PDRB Kota Mataram Menurut Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Kota Mataram Menurut Pengeluaran.....	41
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	41
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	44
3.2.3 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	47
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	50
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori.....	51
3.2.6 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa	52
Bab IV Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kota Mataram	55
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)	57
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB	58
4.3 <i>Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR)</i>	59

Bab V Penutup.....	61
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran	69

<https://mataramkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	35
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	36
Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	39
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	40
Tabel 3.5 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Mataram 2019-2023	42
Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Mataram, 2019-2023 .	45
Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Mataram, 2019-2023	48
Tabel 3.8 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Mataram, 2019-2023	50
Tabel 3.9 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Mataram, 2019-2023	51
Tabel 3.10 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Mataram, 2019-2023	53
Tabel 4.1 Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kota Mataram, 2019-2023	57
Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kota Mataram 2019-2023	59
Tabel 4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kota Mataram 2019-2023	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	34
Grafik 3.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	35
Grafik 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	37
Grafik 3.4 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kota Mataram 2019-2023	38
Grafik 3.5 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	39
Grafik 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023	40
Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Komponen LNPRT, Kota Mataram 2019-2023	46
Grafik 3.8 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan 2010, dan Jumlah Pegawai di Lingkup Pemerintah Kota Mataram, 2019-2023.....	49

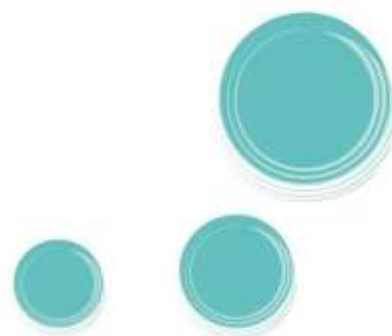
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram Tahun 2019-2023	71
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram Tahun 2019-2023	72
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram Tahun 2019-2023	73
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram Tahun 2019-2023	74

<https://mataramkota.bps.go.id>



PENDAHULUAN



1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi, membutuhkan data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil sebelumnya perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Penyajian statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala diperlukan untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB Menurut Pengeluaran merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Didalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Menurut Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Menurut Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Menurut Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Menurut Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Menurut Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda diatas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan didalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih didalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Menurut Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Menurut Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Menurut Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Menurut Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Dari sudut pandang lain, PDRB Menurut Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

$$Y = C + GCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

dengan:

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Menurut Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Menurut Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Menurut Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar penghitungan PDRB didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *database*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

1.3 Kegunaan Statistik PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB Menurut Pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah.



2

**METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DATA**



Uraian PDRB menurut pengeluaran yang disajikan dalam bab ini mencakup konsep dan definisi dari masing-masing komponen PDRB Menurut Pengeluaran, cakupan, sumber data dan metode estimasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

2.2.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Menurut Pengeluaran⁵. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

2.2.1 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.2.1 Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan didalam maupun diluar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang maupun barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.2.1 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

2.2.1 Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplay;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku;
6. Susun indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);

7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT).

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri didalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan

- istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/ olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Sumber Data

Sumber data untuk penghitungan PK-LNPRT diperoleh dari:

1. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (SK-LNP), BPS
2. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
3. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
4. Indeks Harga Konsumen, BPS

2.2.5 Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;

2. Hasil dari poin 1 dikalikan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada didalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dibidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang

modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan diluar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/ nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

2.3.4 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

2.3.5 Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah bruto mengindikasikan bahwa didalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

2.4.3 Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

2.4.4 Sumber Data

1. Output industri konstruksi, BPS
2. Nilai impor 2 digit HS, BPS
3. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
4. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
5. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
6. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
7. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
8. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
9. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
10. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan SDM
11. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

2.4.5 Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

✓ Metode Langsung:

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) =
Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) =
Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ **Metode Tidak Langsung:**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang

modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*inflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Pendekatan Supply:
PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:
PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga k (t-1) x Indeks

2.5 Perubahan Inventori (PI)

2.5.1 Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori ada beberapa sumber, diantaranya adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan

Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

2.5.5 Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Disisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan

komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

2.6.3 Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota yaitu:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor disebut Net Ekspor.

2.6.4 Sumber Data

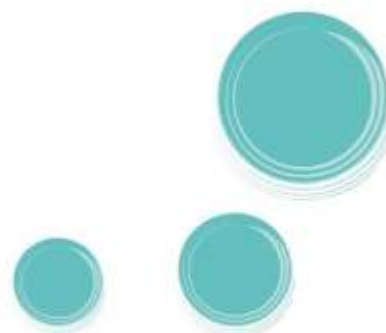
Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun seringkali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

2.6.5 Metode Estimasi

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB Menurut Lapangan Usaha dengan PDRB Menurut Pengeluaran.



**TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA
MATARAM BERDASARKAN PDRB
KOTA MATARAM MENURUT
PENGELUARAN TAHUN 2019-2023**



3.1 Perkembangan PDRB Kota Mataram Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran di Kota Mataram akan diuraikan pada bagian berikut.

Gambaran umum tentang perekonomian Kota Mataram dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram utamanya digerakkan oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kategori ini memberikan kontribusi lebih dari seperlima total PDRB Kota Mataram diantara 17 kategori penyusun PDRB lainnya. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran yang dominan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Komponen ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap pembentukan PDRB menurut pengeluaran di Kota Mataram.

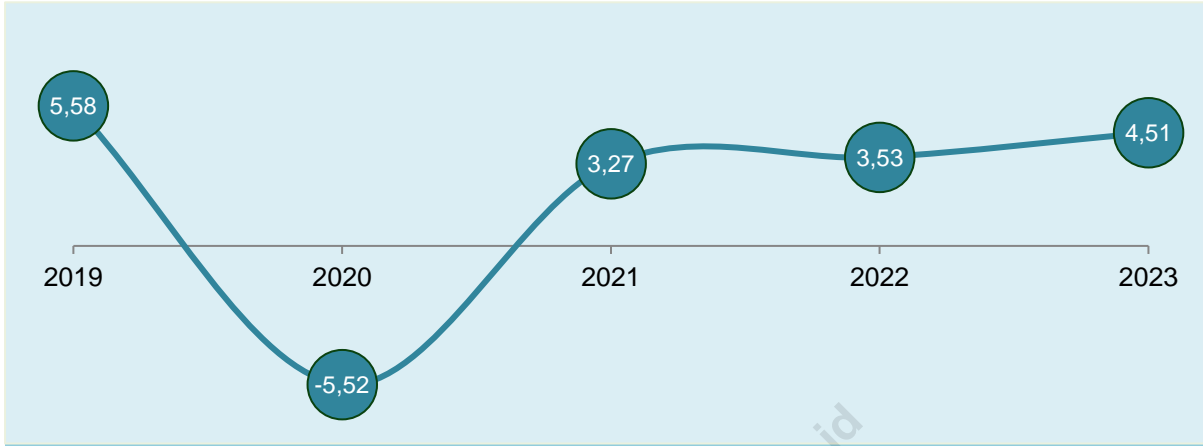
Pada tahun 2023 perekonomian Kota Mataram menunjukkan peningkatan. Secara total, PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku di tahun 2023 meningkat sebesar 7,55 %, yakni dari 21,18 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 22,78 triliun rupiah pada tahun 2023. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, PDRB Kota Mataram tercatat sebesar 13,95 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 14,58 triliun rupiah pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 4,51%.

Percepatan pertumbuhan ekonomi selama 2023 dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi jika dibanding beberapa tahun yang lalu. Selain itu percepatan pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, komponen PMTB dan perbaikan kinerja ekspor antardaerah. Dari sisi investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga terjadi pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah dalam hal ini sisi ekspor. Ditambah lagi dengan daya tarik pusat-pusat perdagangan seperti adanya mall dan pedagang grosiran/eceran yang banyak tersedia di Kota Mataram.

Grafik 3.1

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023**

(Persen)



Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi tahun 2023, Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 10,20 persen. Peningkatan yang signifikan pada kategori ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tambah pada sub kategori penyediaan akomodasi seperti hotel bintang maupun non bintang serta penyediaan makan minum seperti restoran, rumah makan, dan lain-lain.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram didominasi pertumbuhan komponen PMTB, disusul kemudian oleh peningkatan pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, selain itu juga adanya peningkatan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan perbaikan kinerja ekspor antardaerah. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah dalam hal ini sisi ekspor.

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 19.477,38 miliar rupiah (2019); 18.669,61 miliar rupiah (2020); 19.691,61 miliar rupiah (2021); 21.182,26 miliar rupiah (2022) dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 22.780,96 miliar rupiah. Pertumbuhan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan/penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan/penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB Menurut Pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Mataram pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 3.1 dan Grafik 3.2 diatas.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(Miliar Rp)

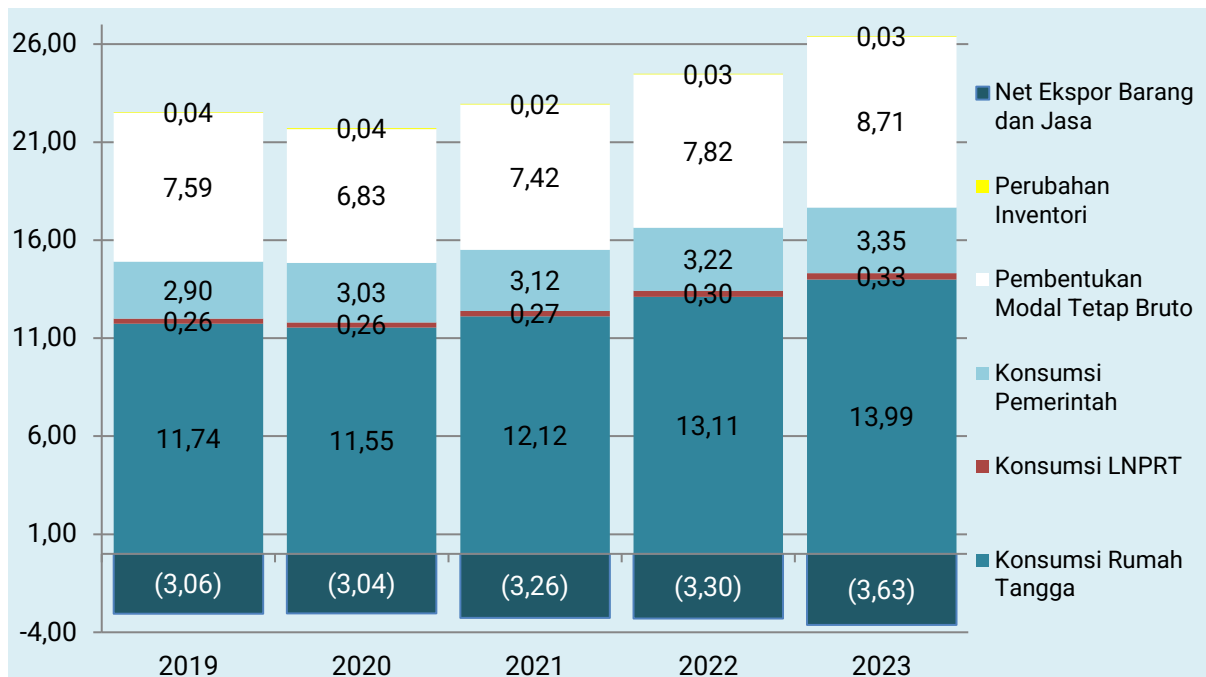
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.740,01	11.549,65	12.117,21	13.114,70	13.988,15
2. Konsumsi LNPRT	264,30	258,71	267,94	297,67	328,65
3. Konsumsi Pemerintah	2.902,99	3.030,51	3.122,59	3.218,93	3.354,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.588,78	6.827,90	7.416,42	7.823,53	8.710,96
5. Perubahan Inventori	39,24	39,46	24,59	26,56	29,24
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.057,94	-3.036,61	-3.257,13	-3.299,12	-3.630,51
PDRB	19.477,38	18.669,61	19.691,61	21.182,26	22.780,96

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram
2019-2023

(Trilyun Rp)



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB Menurut Pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Menurut Pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Mataram pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 3.2 dan Grafik 3.3 berikut ini:

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.587,61	8.358,05	8.606,11	9.017,52	9.387,88
2. Konsumsi LNPRT	180,17	175,23	178,00	188,45	200,60
3. Konsumsi Pemerintah	1.730,46	1.780,24	1.795,50	1.805,00	1.843,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.601,56	4.107,79	4.288,93	4.307,66	4.657,58
5. Perubahan Inventori	26,22	25,74	15,67	16,55	17,02
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.314,15	-1.397,31	-1.408,33	-1.383,33	-1.525,03
PDRB	13.811,86	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39

*Angka Sementara

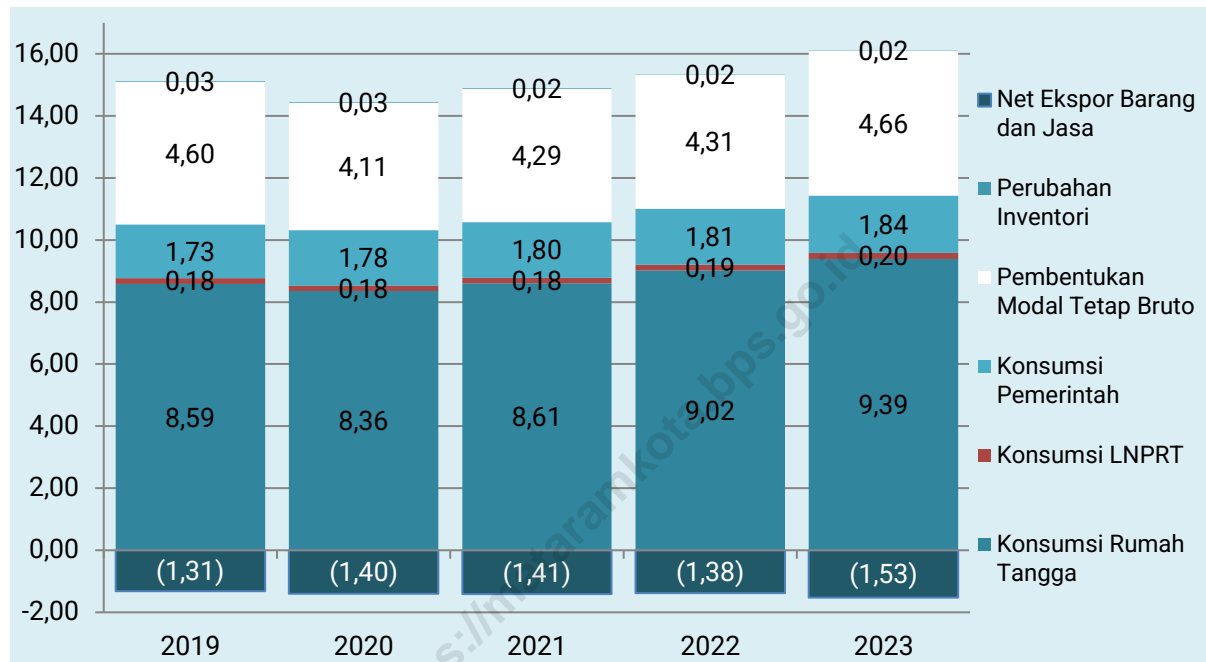
** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kota Mataram pada periode 2019-2023 berfluktuasi, yakni sebesar 13.811,86 miliar rupiah (2019); 13.049,74 miliar rupiah (2020); 13.475,87 miliar rupiah (2021); 13.951,85 miliar rupiah (2022) dan 14.581,39 miliar rupiah (2023). Peningkatan volume ekonomi selama tahun 2023 tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 10,20 persen. Peningkatan yang signifikan pada kategori ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tambah pada sub kategori penyediaan akomodasi seperti hotel bintang maupun non bintang serta penyediaan makan minum seperti restoran, rumah makan, dan lain-lain. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi

tertinggi dicapai oleh komponen PMTB sebesar 8,12 persen, kemudian diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berturut-turut sebesar 6,45 persen dan 4,11 persen.

Grafik 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(Trilyun Rp)



Perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan perubahan harga. Oleh karena itu, kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku tidak selalu menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Bisa saja peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku disebabkan oleh faktor inflasi yang tinggi. Dari Grafik 3.4, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif.

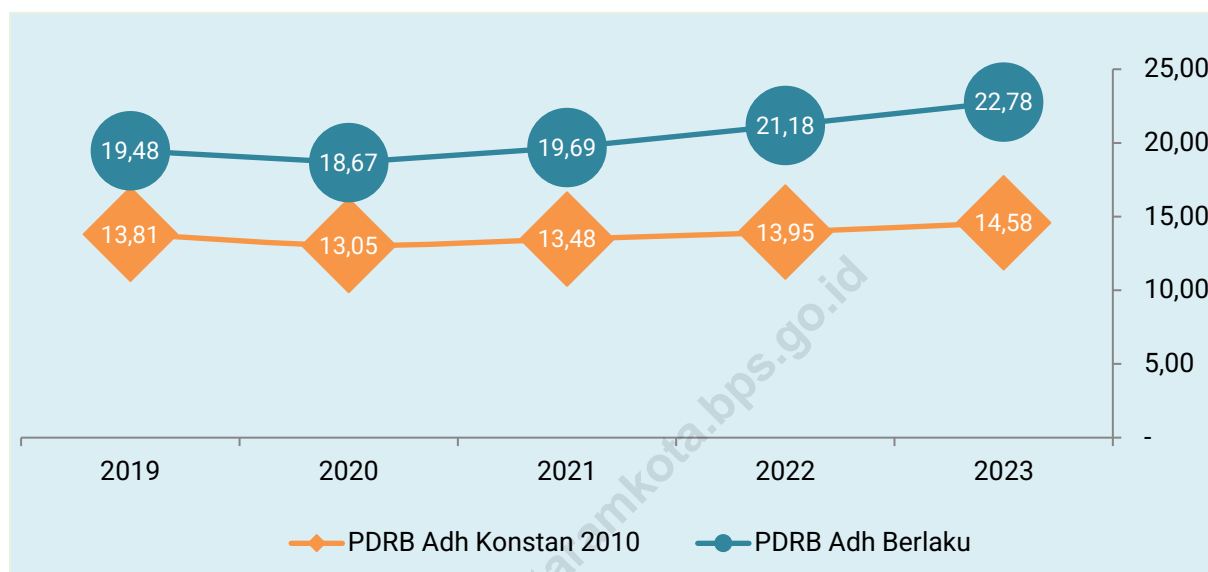
Terbentuknya total PDRB Menurut Pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),

Perubahan Inventori, dan Net Ekspor, yaitu selisih ekspor yang berasal dari Kota Mataram ke daerah lain di Indonesia dan Luar Negeri dikurangi impor dari daerah lain di Indonesia dan Luar Negeri.

Grafik 3.4

Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, Kota Mataram 2019-2023

(Trilyun Rp)



Dari Tabel 3.3 berikut ini terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kota Mataram sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yaitu sekitar 60,28 s.d 61,91 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 36,57 s.d 38,96 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 14,72 s.d 16,23 persen sekaligus menempatkan PK-P sebagai komponen penyusun PDRB ketiga terbesar menurut pengeluaran di Kota Mataram. Dari besaran PK-P tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB Kota Mataram masih pada kisaran dibawah 20 persen. Sedangkan komponen konsumsi LNPRT dan perubahan inventori memberikan kontribusi dibawah 2 persen terhadap penyerapan PDRB Kota Mataram. Disisi lain, selama periode 2019-2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen net ekspor barang dan jasa, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode tersebut selalu menunjukkan posisi "defisit", atau dengan kata lain mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Hal ini tercermin dari komponen net ekspor yang berkontribusi sekitar -16,27 s.d -15,54 persen.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,28	61,86	61,53	61,91	61,40
2. Konsumsi LNPRT	1,36	1,39	1,36	1,41	1,44
3. Konsumsi Pemerintah	14,90	16,23	15,86	15,20	14,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,96	36,57	37,66	36,93	38,24
5. Perubahan Inventori	0,20	0,21	0,12	0,13	0,13
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-15,70	-16,27	-16,54	-15,57	-15,94
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 3.5
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(%)



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.4, selama lima tahun

terakhir perekonomian di Kota Mataram mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Sedangkan dari Grafik 3.6 terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(%)

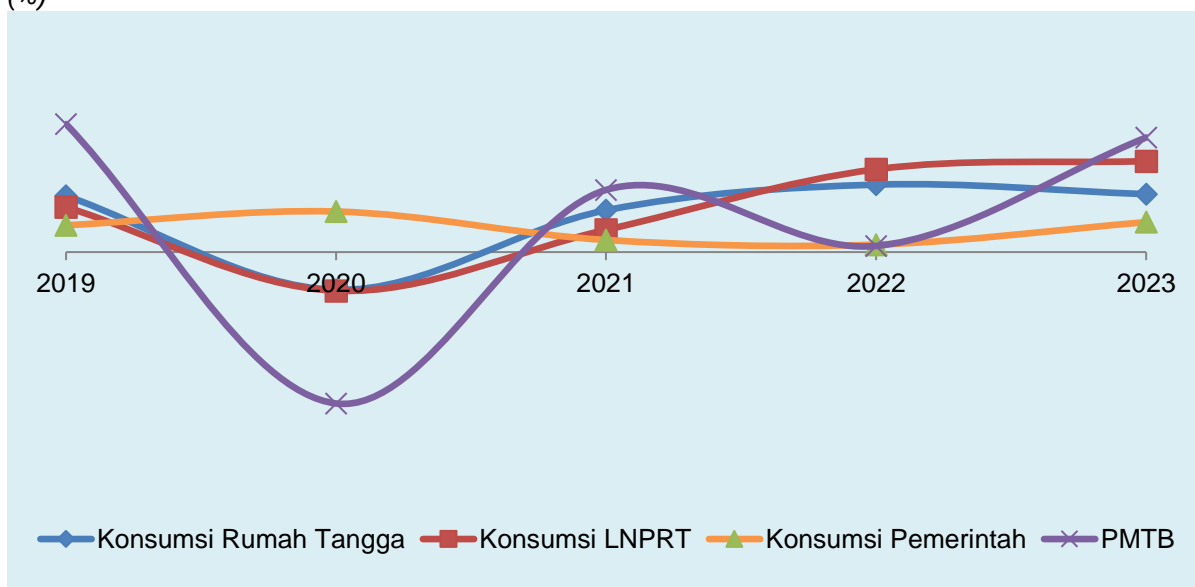
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,99	-2,67	2,97	4,78	4,11
2. Konsumsi LNPRT	3,19	-2,74	1,58	5,87	6,45
3. Konsumsi Pemerintah	1,90	2,88	0,86	0,53	2,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,07	-10,73	4,41	0,44	8,12
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,58	-5,52	3,27	3,53	4,51

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kota Mataram 2019-2023

(%)



3.2 Perkembangan Komponen PDRB Kota Mataram Menurut Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Mataram, ternyata sebagian besar produk masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Mataram maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu:

- (1) kelompok makanan dan minuman selain restoran;
- (2) pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya;
- (3) perumahan dan perlengkapan rumah tangga;
- (4) kesehatan dan pendidikan;
- (5) angkutan dan komunikasi;
- (6) restoran dan hotel;
- (7) barang dan jasa lainnya.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.5
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga,
Kota Mataram 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.740,01	11.549,65	12.117,21	13.114,70	13.988,15
b. ADHK (Miliar Rp)	8.587,61	8.358,05	8.606,11	9.017,52	9.387,88
Proporsi Terhadap PDRB (%)	60,28	61,86	61,53	61,91	61,40
Rata-rata Konsumsi perkapita					
a. ADHB (Juta Rp)	23,73	26,89	28,05	30,20	31,71
b. ADHK (Juta Rp)	17,36	19,46	19,92	20,76	21,28
Pertumbuhan⁶					
a. Total konsumsi RT (%)	3,99	-2,67	2,97	4,78	4,11
b. Konsumsi Perkapita (%)	0,35	12,10	2,39	4,22	2,50
Jumlah Penduduk (Jiwa)	494.781	429.586	432.024	434.331	441.147

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan baik dinilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun-tahun setelahnya pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga kembali

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

mengalami peningkatan baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan).

Jika dilihat berdasarkan nilai absolutnya, besaran komponen PK-RT menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif pada periode 2019-2023, baik dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Perubahan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya perubahan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2019 komponen PK-RT atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan, yakni sebesar 11.740,01 miliar rupiah. Pada tahun 2020, besaran PK-RT atas dasar harga berlaku mengalami penurunan menjadi sebesar 11.549,65 miliar rupiah. Namun kembali mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 12.117,21 miliar rupiah (2021); 13.114,70 miliar rupiah (2022); dan 13.988,15 miliar rupiah (2023). Jika dilihat dalam rentang 5 tahun terakhir komponen PK-RT meningkat sebesar 2.248,14 miliar rupiah dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga Konstan 2010 di Kota Mataram, komponen PK-RT juga menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif pada rentang 2019-2023. Pada tahun 2019 komponen PK-RT sebesar 8.587,61 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2020 nilainya menurun hingga sebesar 8.358,05 miliar rupiah. Pada tahun 2021-2023 kembali mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8.606,11 miliar rupiah, 9.017,52 miliar rupiah, 9.387,88 miliar rupiah. Dalam periode 5 tahun terakhir komponen PK-RT atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar 800,28 miliar rupiah sejak tahun 2019.

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif setiap tahunnya, yaitu 60,28 persen (2019); 61,86 persen (2020); 61,53 persen (2021); 61,91 persen (2022) dan 61,40 persen (2023). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 61,91 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 60,28 persen. Dalam periode 5 tahun terakhir kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB Kota Mataram secara total meningkat sebesar 1,12 persen.

Secara rata-rata, konsumsi perkapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019, secara rata-rata setiap orang di Kota Mataram menghabiskan dana sekitar 23,73 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 26,89 juta rupiah (2020); 28,05 juta rupiah (2021); 30,20 juta rupiah (2022) dan 31,71 juta rupiah (2023). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010 total konsumsi tumbuh pada kisaran minus 2,67 sampai dengan 4,78 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” meningkat pada kisaran 0,35 sampai dengan 12,10 persen.

Pada periode 2019-2023 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 3,99 persen (2019); -2,67 persen (2020); 2,97 persen (2021); 4,78 persen (2022); dan 4,11 persen (2023). Sementara itu laju pertumbuhan konsumsi perkapita pada masing-masing tahun adalah 0,35 persen (2019); 12,10 persen (2020); 2,39 persen (2021); 4,22 persen (2022); dan 2,50 persen (2023). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk, kecuali pertumbuhan konsumsi perkapita tahun 2019 yang berada pada kisaran dibawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sejak tahun 2021 perekonomian Kota Mataram sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah tertahan karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Pada tahun 2023 komponen PK-RT mengalami pertumbuhan hingga 4,11 persen yang secara umum disebabkan antara lain oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Perbaikan ekonomi ini didukung oleh mulai normalnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, mulai maraknya beberapa *event* baik yang berskala nasional maupun berskala internasional diselenggarakan di Kota Mataram. Beberapa *event* besar yang terselenggara antara lain MXGP Selaparang, Seleksi Tilawatil Quran Hadits (STQH) tingkat Provinsi NTB, dan berbagai *Live Concert Music* yang diselenggarakan di Kota Mataram.

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non-Profit adalah entitas legal atau sosial yang dibentuk oleh rumah tangga, korporasi atau pemerintah dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dimana status non-profit yang disandang tidak mengizinkan lembaga ini menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang mendirikan, mengendalikan atau mendanai. Untuk menjalankan kegiatannya, lembaga ini bisa memperoleh dana yang berasal dari sumbangan. Dengan demikian, Lembaga Non-Profit mampu memperoleh aset yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan berupa pendapatan kepemilikan.

Lembaga Non-Profit yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah digolongkan sebagai sektor institusi tersendiri yaitu Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Jadi, LNPRT adalah entitas legal maupun sosial yang tidak dikendalikan pemerintah dan dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. Contoh: partai politik, Ikatan Dokter Indonesia, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Output LNPRT yang menyediakan jasa ke individu anggota atau rumah tangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumah tangga.

Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Peran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) semakin meningkat, baik dari sudut ekonomi, sosial, maupun politik. LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, *United Nations* melalui buku *System of National Accounts 2008*, menyatakan bahwa LNPRT merupakan salah satu sektor unit institusi tersendiri di dalam suatu perekonomian.

Tabel 3.6
Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	264,30	258,71	267,94	297,67	328,65
b. ADHK (Miliar Rp)	180,17	175,23	178,00	188,45	200,60
Proporsi Terhadap PDRB (%)	1,36	1,39	1,36	1,41	1,44
Pertumbuhan ADHK 2020 (%)	3,19	-2,74	1,58	5,87	6,45

*Angka Sementara

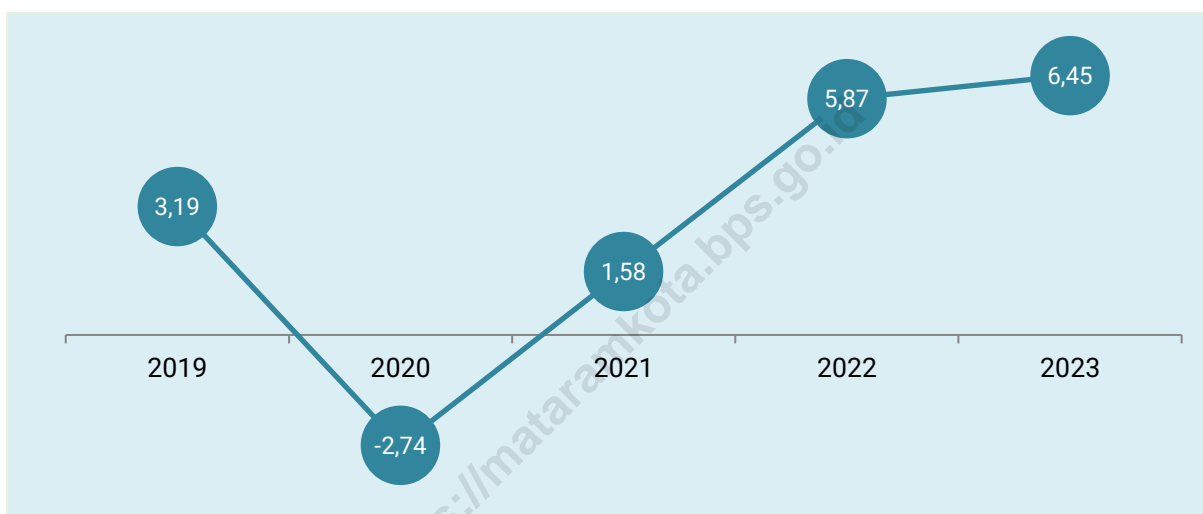
** Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami pergerakan yang berfluktuatif baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 264,30 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 258,71 miliar rupiah (2020); 267,94 miliar rupiah (2021); 297,67 miliar rupiah (2022); dan 328,65 miliar rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan 2010 juga berturut-turut adalah 3,19 persen (2019); -2,74 persen (2020); 1,58 persen (2021); 5,87 persen (2022); dan 6,45 persen (2023).

Grafik 3.7
Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Komponen LNPRT
Kota Mataram 2019-2023

(%)



Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat dampak pandemi COVID-19. Adanya pemilihan walikota dan wakil walikota yang digelar pada penghujung tahun 2020 tidak mampu menahan terkontraksinya laju pertumbuhan ekonomi komponen pengeluaran akhir LNPRT di Kota Mataram. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 berkaitan dengan persiapan partai politik menjelang PEMILU 2024. Tingginya aktivitas partai politik pada tahun ini mendorong meningkatkan konsumsi komponen LNPRT pada pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Adanya pendaftaran calon legislatif, kampanye partai politik, berbagai musyawarah tingkat daerah yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, serta perjalanan dinas yang dikeluarkan partai politik dalam rangka menghadiri berbagai acara kepartaian di luar daerah turut menambah laju nilai tambah bruto LNPRT di Kota Mataram. Selain itu peningkatan laju pertumbuhan komponen PK-LNPRT ini juga didorong oleh pelaksanaan berbagai *event* di Kota Mataram, seperti: Musyawarah Nasional (MUNAS) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI), penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Provinsi NTB di Kota Mataram

tanggal 18-24 Juni 2023, dan parade ogoh-ogoh yang kembali digelar di Kota Mataram. walaupun terdapat pembatasan selama parade.

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.902,99 miliar rupiah, kemudian tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut sebesar 3.030,51 miliar rupiah (2020); 3.122,59 miliar rupiah (2021); 3.218,93 miliar rupiah (2022) dan 3.354,47 miliar rupiah (2023). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB perlahan-lahan mengalami penurunan pada periode 2019-2023. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah dengan trend yang berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 14,90 persen (tahun 2019) hingga mencapai 14,72 persen (tahun 2023).

Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,90 persen; dan proporsi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 16,23 persen.

Tabel 3.7
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.902,99	3.030,51	3.122,59	3.218,93	3.354,47
b. ADHK (Miliar Rp)	1.730,46	1.780,24	1.795,50	1.805,00	1.843,33
Proporsi Terhadap PDRB (%)	14,90	16,23	15,86	15,20	14,72
Rata-rata Konsumsi Pemerintah Perkapita					
a. ADHB (Juta Rp)	5,87	7,05	7,23	7,41	7,60
b. ADHK (Juta Rp)	3,50	4,14	4,16	4,16	4,18
Pertumbuhan⁷					
a. Total konsumsi Pemerintah (%)	1,90	2,88	0,86	0,53	2,12
b. Konsumsi Perkapita (%)	-1,66	18,49	0,29	-0,005	0,55
Jumlah Penduduk (Jiwa)	494.781	429.586	432.024	434.331	441.147

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 5,87 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu 7,05 juta rupiah (2020); 7,23 juta rupiah (2021); 7,41 juta rupiah (2022); dan mencapai 7,60 juta rupiah pada tahun 2023.

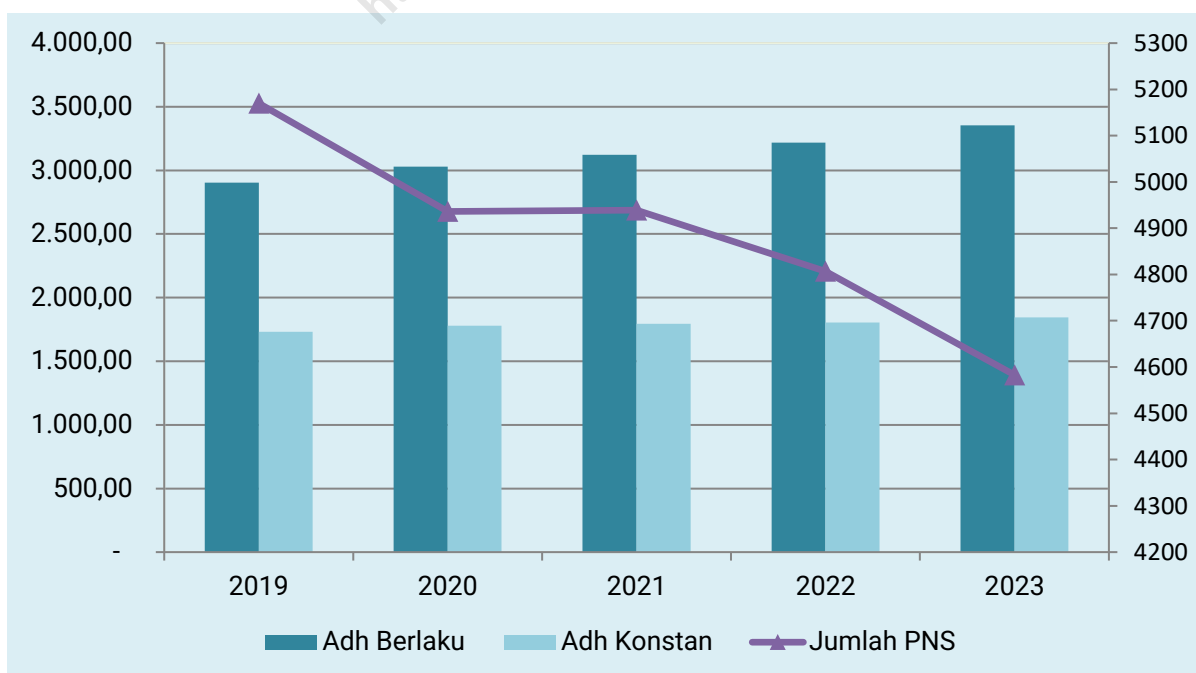
⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 3,50 juta rupiah (2019); 4,14 juta rupiah (2020); 4,16 juta rupiah (2021); 4,16 juta rupiah (2022); dan 4,18 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan perkapita sebesar -1,66 persen (2019), kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah perkapita yaitu 18,49 persen (2020); 0,29 persen (2021); -0,005 persen (2022); dan pada tahun 2023 sebesar 0,55 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 2,88 persen; dan untuk konsumsi perkapita 18,49 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, tidak sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.8 berikut ini:

Grafik 3.8
Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan 2010, dan Jumlah Pegawai di Lingkup Pemerintah Kota Mataram 2019-2023



3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) didalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB merupakan salah satu cerminan penanaman investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. PMTB berdasarkan harga berlaku periode 2019-2023 berturut-turut sebagai berikut: 7.588,78 milyar rupiah (2019); 6.827,90 milyar rupiah (2020); 7.416,42 milyar rupiah (2021); 7,823,53 milyar rupiah (2022); dan 8.710,96 milyar rupiah (2023). Dalam periode lima tahun terakhir, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat sekitar 1.122,18 milyar rupiah. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan trend yang berfluktuatif dari 9,07 persen (2019) menjadi 8,12 persen (2023).

Tabel 3.8
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	7.588,78	6.827,90	7.416,42	7.823,53	8.710,96
b. ADHK (Miliar Rp)	4.601,56	4.107,79	4.288,93	4.307,66	4.657,58
Proporsi Terhadap PDRB (%)	38,96	36,57	37,66	36,93	38,24
Pertumbuhan ADHK 2020 (%)	9,07	-10,73	4,41	0,44	8,12

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan PMTB mengalami kontraksi sebesar -10,73 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 pada komponen PMTB disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Sebagian besar pelaku ekonomi baik pemerintah, swasta, maupun perorangan mengubah persepsi mereka pada penggunaan

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

modal yang awalnya ditujukan untuk investasi ditengah ketidakpastian stabilitas ekonomi yang dihadapi selama pandemi. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,41 persen, dan kembali tumbuh pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,44 persen dan 8,12 persen. Peningkatan komponen PMTB ini sejalan dengan peningkatan nilai tambah dari aktifitas konstruksi dan investasi barang modal di Kota Mataram, seperti pembangunan gedung kantor, pembangunan ruang kreatif dan aktifitas pelaku ekonomi baik pemerintah, swasta maupun perorangan dalam pengadaan barang modal bangunan dan non bangunan.

3.2.5 Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.9
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	39,24	39,46	24,59	26,56	29,24
b. ADHK (Miliar Rp)	26,22	25,74	15,67	16,55	17,02
Proporsi Terhadap PDRB (%)	0,20	0,21	0,12	0,13	0,13

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2019 komponen perubahan inventori mencapai 39,24 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2020 sebesar 39,46 miliar rupiah, pada tahun 2021 tercatat sebesar 24,59 miliar rupiah, pada tahun 2022 sebesar 26,56 miliar rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 29,24 miliar rupiah. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Mataram menunjukkan gerakan yang perlahan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019, proporsi perubahan inventori adalah sebesar 0,20 persen, selanjutnya pada tahun-tahun setelahnya berturut-turut sebesar 0,21 persen (2020), 0,12 persen (2021), 0,13 persen (2022), dan 0,13 persen (2023). Proporsi perubahan inventori tertinggi terjadi pada tahun 2019, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbaikan kondisi perekonomian seiring dengan menurunnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan penerapan kebijakan vaksin COVID-19 yang masif dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 geliat perekonomian khususnya di Kota Mataram mulai terlihat. Banyak usaha/perusahaan dan produsen yang ada di Kota Mataram mulai kembali menunjukkan aktifitasnya. Barang-barang yang tadinya dalam posisi inventori/stok pada tiga tahun ini bergerak mengikuti perputaran ekonomi.

3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Mataram, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Mataram. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (kategori).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Mataram diluar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Mataram terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena net ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar daripada permintaan barang di dalam negeri, sehingga output juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan output ini menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila net ekspor mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri sehingga impor lebih besar dari pada ekspor dan hal ini akan mengakibatkan penurunan produksi barang dan jasa dan output akan mengalami penurunan. Penurunan output ini menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.10
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Miliar Rp)	-3.057,94	-3.036,61	-3.257,13	-3.299,12	-3.630,51
b. ADHK (Miliar Rp)	-1.314,15	-1.397,31	-1.408,33	-1.383,33	-1.525,03
Proporsi Terhadap PDRB (%)	-15,70	-16,27	-16,54	-15,57	-15,94

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

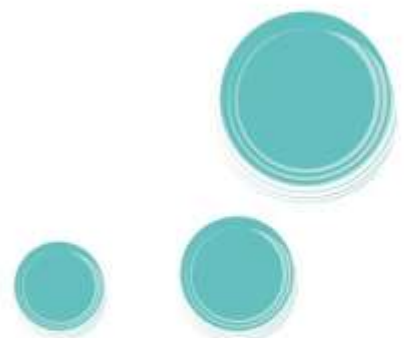
Besaran nilai net ekspor barang dan jasa di Kota Mataram periode 2019-2023 selalu bernilai negatif baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Hal ini berarti nilai impor barang dan jasa lebih besar jika dibandingkan nilai ekspor barang dan jasa. Pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 komponen net ekspor barang dan jasa Kota Mataram berturut-turut mencapai -3.057,94 miliar rupiah, -3.036,61 miliar rupiah, -3.257,13

miliar rupiah, -3.299,12 miliar rupiah, dan -3.630,51 miliar rupiah. Sementara itu, proporsi net ekspor barang dan jasa terhadap total PDRB di Kota Mataram menunjukkan gerakan yang berfluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, proporsi net ekspor barang dan jasa adalah -15,70 persen, selanjutnya -16,27 persen (2020), -16,54 persen (2021), -15,57 persen (2022) dan -15,94 persen (2023).

<https://mataramkota.bps.go.id>



**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KOTA MATARAM MENURUT
PENGELUARAN TAHUN 2019-2023**



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, ditengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan didalam wilayah ekonomi Kota Mataram, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB Menurut Pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 4.1
Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kota Mataram, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
c. ADHB (Miliar Rp)	19.477,38	18.669,61	19.691,61	21.182,26	22.780,96
d. ADHK (Miliar Rp)	13.811,86	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39
PDRB Perkapita					
c. ADHB (Juta Rp)	39,37	43,46	45,58	48,77	51,64
d. ADHK (Juta Rp)	27,92	30,38	31,19	32,12	33,05
Pertumbuhan PDRB					
c. Pertumbuhan Total (%)	5,58	(5,52)	3,27	3,53	4,51
d. Pertumbuhan Perkapita (%)	1,89	8,82	2,68	2,98	2,90
Jumlah Penduduk (Jiwa)	494.781	429.586	432.024	434.331	441.147

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita Kota Mataram secara total mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sebesar 39,37 juta rupiah, terus meningkat hingga sebesar 51,64 juta rupiah pada tahun 2023. PDRB perkapita Kota Mataram secara umum selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

Di sisi lain jumlah penduduk Kota Mataram juga terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan pada kisaran 1-2 persen per tahun. Walaupun demikian pertumbuhan penduduk masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Mataram mampu menciptakan nilai tambah sebesar nilai tambah perkapita.

Penghitungan PDRB perkapita dalam lima tahun terakhir menggunakan jumlah penduduk dengan pendekatan yang berbeda. Penghitungan PDRB perkapita pada tahun 2019 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan tahun 2020-2023 menggunakan penghitungan interim jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Mataram adalah 441.147 penduduk. Jumlah penduduk ini meningkat sebanyak 1,57 persen dibandingkan tahun 2022.

4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB

Bagian ini akan membahas perbandingan antara konsumsi akhir dari pelaku ekonomi di wilayah domestik dengan total PDRB. Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Dari data pada Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Mataram digunakan untuk permintaan akhir dan masih harus mengimpor dari luar daerah dan luar negeri. Proporsi pengeluaran konsumsi akhir terhadap total PDRB selama periode 2019-2023 berada pada kisaran 76,54-79,48 persen. Proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 76,54 persen. Sedangkan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 79,48 persen. Hal ini berarti sebagian besar penyediaan

(supply) domestik diserap untuk memenuhi permintaan akhir rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah.

Tabel 4.2
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB,
Kota Mataram 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	11.740,01	11.549,65	12.117,21	13.114,70	13.988,15
b. LNPRT	264,30	258,71	267,94	297,67	328,65
a. Pemerintah	2.902,99	3.030,51	3.122,59	3.218,93	3.354,47
JUMLAH	14.907,30	14.838,86	15.507,73	16.631,29	17.671,27
PDRB ADHB (Miliar Rp)	19.477,38	18.669,61	19.691,61	21.182,26	22.780,96
Proporsi (%)	76,54	79,48	78,75	78,52	77,57

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi industri/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter Nilai Tambah.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak K unit.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I_t}{\Delta Y} = \frac{\Delta K}{Y_t - Y_{(t-1)}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke-t
 Y_t = Output tahun ke-t
 $Y_{(t-1)}$ = Output tahun ke-t-1

Tabel 4.3**Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Mataram 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	13.811,86	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39
Perubahan (miliar rupiah)	729,87	-762,12	426,13	475,98	629,54
PMTB ADHK 2010 (miliar rupiah)	4.601,56	4.107,79	4.288,93	4.307,66	4.657,58
ICOR	6,30	-5,39	10,06	9,05	7,40

*Angka Sementara

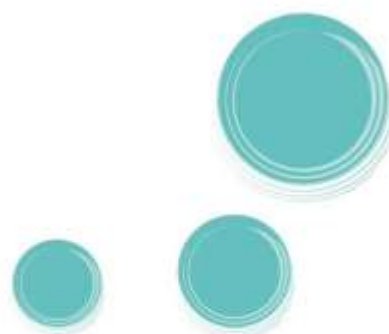
** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR selama periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan. ICOR tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,06, sedangkan ICOR terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,39. Koefisien ICOR yang bernilai negatif dapat dimaknai bahwa investasi yang dilakukan pada saat itu belum/tidak efisien. Hal ini dapat terjadi terutama saat stabilitas perekonomian tidak menentu akibat adanya pandemi COVID-19 selama tahun 2020. Investasi yang dilakukan pada suatu tahun tidak secara langsung memberikan peningkatan jumlah output pada tahun bersangkutan, tapi justru akan berpengaruh pada tahun-tahun berikutnya.



PENUTUP

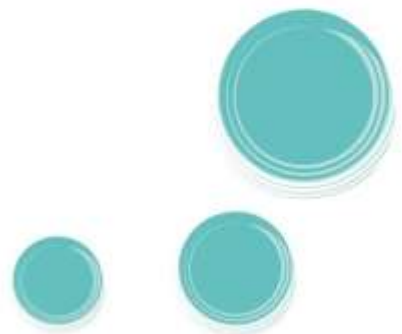
<https://mataramkota.bps.go.id>



1. PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Mataram pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB Menurut Pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB Menurut Pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019-2023, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antarwaktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB Menurut Lapangan Usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Mataram terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

DAFTAR PUSTAKA

<https://mataramkota.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik, *Incremental Capital Output Ratio* Sektor Industri, Jakarta, 1980-1990.

Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Profil Ekonomi Rumah tangga* 1998, Jakarta, 1999.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD* 1997, Jakarta, 2000.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertambangan non Migas*, berbagai seri, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

Frenken Jim, How To Measure Tangible Capital Stocks, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, Macroeconomic Accounts an Overview, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

Keuning. J. Steven, An Estimate of the Fixed Capital Stock by Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

United Nations, Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

United Nations, Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

United Nations, Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

United Nations, Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.

Verbiest Piet, Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries, Paris, 1976.

World Bank, System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

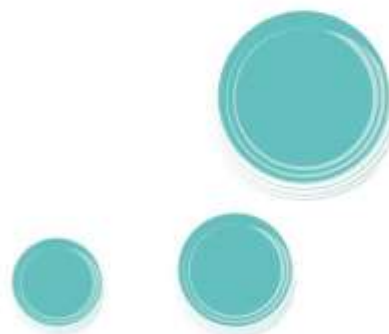
<https://www.bps.go.id/> terakhir diakses pada 24 April 2024.

<https://ntb.bps.go.id/> terakhir diakses pada 24 April 2024.

<https://mataramkota.bps.go.id/> terakhir diakses pada 24 April 2024.

LAMPIRAN

<https://mataradikota.bps.go.id>



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023

(Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.740,01	11.549,65	12.117,21	13.114,70	13.988,15
2. Konsumsi LNPRT	264,30	258,71	267,94	297,67	328,65
3. Konsumsi Pemerintah	2.902,99	3.030,51	3.122,59	3.218,93	3.354,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.588,78	6.827,90	7.416,42	7.823,53	8.710,96
5. Perubahan Inventori	39,24	39,46	24,59	26,56	29,24
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.057,94	-3.036,61	-3.257,13	-3.299,12	-3.630,51
PDRB	19.477,38	18.669,61	19.691,61	21.182,26	22.780,96

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023

(Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.587,61	8.358,05	8.606,11	9.017,52	9.387,88
2. Konsumsi LNPRT	180,17	175,23	178,00	188,45	200,60
3. Konsumsi Pemerintah	1.730,46	1.780,24	1.795,50	1.805,00	1.843,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.601,56	4.107,79	4.288,93	4.307,66	4.657,58
5. Perubahan Inventori	26,22	25,74	15,67	16,55	17,02
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.314,15	-1.397,31	-1.408,33	-1.383,33	-1.525,03
PDRB	13.811,86	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,28	61,86	61,53	61,91	61,40
2. Konsumsi LNPRT	1,36	1,39	1,36	1,41	1,44
3. Konsumsi Pemerintah	14,90	16,23	15,86	15,20	14,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,96	36,57	37,66	36,93	38,24
5. Perubahan Inventori	0,20	0,21	0,12	0,13	0,13
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-15,70	-16,27	-16,54	-15,57	-15,94
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Mataram 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,99	-2,67	2,97	4,78	4,11
2. Konsumsi LNPRT	3,19	-2,74	1,58	5,87	6,45
3. Konsumsi Pemerintah	1,90	2,88	0,86	0,53	2,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,07	-10,73	4,41	0,44	8,12
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,58	-5,52	3,27	3,53	4,51

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Rembiga-Kota Mataram
Telp (62-370) 642544, Faks (62-370) 642544,
Homepage : <http://mataramkota.bps.go.id>
E-mail : bps5271@bps.go.id